

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu Bumdes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal kepasar.

Pendirian Bumdes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang

berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian Bumdes juga dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Bumdes diartikan sebagaimana yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”. Sebagai Lembaga yang di kelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat, Bumdes itu sendiri mendapatkan sumber modal dari penyertaan modal desa yang bersumber dari dana APBD, penyertaan dari masyarakat desa, sebagian dari hasil/laba yang diperoleh melalui usaha yang dijalankan oleh Bumdes yang telah di tetapkan.

Berdasarkan Perpres Nomor: 192 Tahun 2014 tentang BPKP, BPKP berniatif untuk melakukan pembinaan Bumdes dengan memberikan asisten penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi Bumdes yang dikembangkan deputi akuntan negara. Petunjuk teknis laporan keuangan Bumdes ini merupakan salah satu petunjuk teknis pedoman asistensi tata kelola keuangan dan kinerja Bumdes yang merupakan pedoman untuk menilai kinerja Bumdes.

Sebagai wadah dari masyarakat, kinerja Bumdes seringkali dinodai oleh praktek-praktek penyimpangan dan tindakan kurang efisien yang dilakukan sehingga menurunnya kredibilitas Bumdes dipandangan masyarakat umum. Menurut (Nursam, 2017) kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Target kinerja yang seharusnya menjadi acuan organisasi menjadi terhambat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti sistem dan pelayanan yang belum terealisasi sesuai target secara maksimal oleh Bumdes desa Bungkulan Kecamatan Sawan. Ketepatan waktu dan *human error* berdampak pada kinerja yang kurang optimal. Hal ini disampaikan oleh dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut penuturan dari Bapak Wijana sebagai kepala dinas banjar, pernah terjadi hambatan pelayanan pada Bumdes desa Bungkulan, setelah tiang bertanya kepada pegawai di Bumdes. Bahwa Bumdes desa Bungkulan masih menggunakan sistem/pencatatan seadanya, sering terjadi salah pencatatan sehingga harus ngulang dan ini menyebabkan penggunaan waktu yang kurang efektif. Pegawai yang ada pada Bumdes enggan untuk mempelajari sistem secara online, padahal dengan adanya sistem dalam online akan mempercepat kerja, selain tentang sistem yang bermasalah. Mengenai pelayanan kepada masyarakat yakni transportasi yang digunakan dalam pengambilan sampah di setiap banjar sering mengalami kerusakan hal ini juga menghambat dari pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat”

Permasalahan lainnya seperti tidak Bergeraknya dibidang simpan pinjam, sebagai contoh yang terjadi pada Bumdes di Desa Sudaji Kecamatan Sawan pada tahun 2019. Sejalan dengan diungkapkan oleh salah satu informan

“Bapak Armika menuturkan bahwa pada tahun 2019 memang benar terjadi permasalahan mengalami kendala dalam oprasional simpan pinjam pada Bumdes tersebut. Dalam pengoperasannya, ketercapaian dari taget kinerja yang telah ditetapkan mengalami kendala. Padahal pelayanan dalam bentuk simpan pinjam menjadi target utama dalam Bumdes tersebut”.

Berdasarkan fenomena diatas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada Bumdes salah satunya melalui sistem penyusunan anggaran yang tepat, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu topdown, bottom up dan partisipasi. Dalam sistem penganggaran top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemegang kuasa. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (*overloaded*). Minimnya pengetahuan dari atasan/pemegang kuasa anggaran pada Bumdes terkait potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Tentunya hal ini mengakibatkan kinerja yang kurang optimal bagi entitas/lembaga. Selayaknya seperti yang terjadi di desa Sudaji dan di desa Bungkul Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian (Oktariani et al., 2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran partisipatif merupakan pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan keefektifan organisasional melalui peningkatan kinerja. Para manajer lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan anggaran, dimana mereka terlibat dalam proses penyusunannya dan menerima pendelegasian wewenang yang relatif besar dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan anggaran. Penyusunan anggaran secara

partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Saraswati, 2015).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Fitriani & Zairinah, 2018). Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah sebagai *agent* dan DPRD sebagai *principal*. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari *agent* atau pemerintah daerah. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut (Fitriani dkk, 2018). Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.

Kecukupan anggaran dalam organisasi akan mempengaruhi hasil kerja organisasi tersebut (Astuti dkk, 2019). Kecukupan anggaran yaitu tingkatan

dimana seseorang merasa bahwa sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh dalam hal tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Keberhasilan individu maupun organisasi tergantung pada keadaan dimana bawahan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. Dalam penelitian (N. K. C. P. Sari, 2019) menjelaskan kecukupan anggaran terhadap kinerja Bumdes menunjukkan hasil positif dan signifikan. Persepsi kecukupan anggaran mengarah pada kinerja manajer pusat pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Kecukupan anggaran juga mendorong partisipasi manajerial dalam penyusunan anggaran agar organisasi tersebut memperoleh anggaran yang mencukupi. Semakin tinggi tingkat kecukupan anggaran maka akan semakin optimal kinerja disebuah organisasi.

Untuk menjamin bahwa anggaran yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu dilakukannya suatu pengendalian tentang kejelasan sasaran anggaran yang ada. Peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi harus memperhatikan sasaran anggaran. Anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang di harapkan, sehingga perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi (Setiawan, 2013).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak terpisah dari peningkatan kinerja sebuah organisasi. Teknologi dan informasi sangat banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperbaiki kinerja organisasi terutama dalam hal pelaporan baik keuangan maupun non keuangan. Sistem informasi akuntansi menjadi suatu alat yang sangat penting dalam menilai kinerja. Penerapan sistem informasi akuntansi merupakan investasi yang penting untuk suatu perusahaan (Ratnaningsih, 2014). (Jayanti 2017) memaparkan bahwa kinerja sistem informasi akuntansi merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan sistem akuntansi yang digunakan pada suatu perusahaan dalam memberikan informasi keuangan yang efisien dan akurat sesuai dengan tujuan organisasi.

Keefektifan sistem informasi akuntansi dapat mengukur suatu keunggulan perusahaan atau organisasi tertentu dalam upaya bersaing yang sehat di dunia bisnis. Peningkatan efektivitas sistem informasi akuntansi membutuhkan adanya peran dan partisipasi manajemen yang signifikan dalam mendukung implementasi dan pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut. Dukungan manajemen puncak memegang peran penting dalam tahap siklus pengembangan dan keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi. Manajemen puncak melalui kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi, yang memungkinkan pemakai untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pengembangan sistem dan ini akan berpengaruh pada keberhasilan sistem informasi akuntansi.

Konsep teori kontingensi berkaitan erat dengan penelitian dalam hal penilaian kinerja. Baik/buruk kualitas kinerja dari pada organisasi sangat ditentukan oleh

pimpinan. Pimpinan akan mengkomordir tugas dan fungsi bawahan secara mendetail dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pimpinan dalam hal memberikan koordinasi untuk menciptakan kinerja yang optimal tidak terlepas dari ikut sertanya pegawai dalam penyusunan sebuah anggaran. Seluruh pegawai akan paham jikalau mereka juga ikut adil dalam kegiatan tersebut. Kemudian anggaran yang telah ditetapkan, harus jelas dan cukup peruntukannya dalam hal meningkatkan kinerja organisasi. Teknologi menjadi bagian yang penting bagi organisasi yang secara signifikan ingin meningkatkan kualitas kinerja. Sebab, organisasi memiliki mobilitas yang tinggi, antisipasi yang bisa dilakukan untuk percepatan realisasi anggaran dan meminimalisir resiko salah pencatatan kas masuk/keluar yakni dengan menerapkan sistem informasi yang sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Berbagai penelitian tentang pangaruh partisipasi penyusunan anggaran, kecukupan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bumdes telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2015) menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktariani et al., 2016) menunjukkan sistem informasi berbasis komputer, partisipasi penyusunan anggaran, dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja disebuah organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sawitri, 2016) menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan anggaran dan kecukupan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Selamat (2019) menunjukkan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kinerja Bumdes. Jika suatu sistem di sebuah Bumdes sudah memadai maka kinerja semakin optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, 2015) bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Artinya, kinerja karyawan BPR dikabupaten magelang tidak ditentukan oleh penerapan sistem informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Widayati, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja individu kepercayaan terhadap sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini merupakan penelitian replika yang sebelumnya dilakukan oleh (N. K. C. P. Sari, 2019) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kecukupan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Bumdes di Kabupaten Karangasem. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini dilakukan penambahan variabel yaitu efektivitas penerepan sistem informasi akuntansi, alasan dipilih variabel tersebut karena penelitian mengenai efektivitas penerepan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bumdes masih ada yang tidak berpengaruh dan pada dasarnya sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan secara efektif pada organisasi mampu menunjang/mempercepat ketercapaian target yang telah ditetapkan baik lingkup keuangan maupun non keuangan sejalan dengan Damayanthi, (2012) yang menjelaskan efektivitas sistem informasi akuntansi yaitu gambaran sejauh mana

target yang dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu. Penelitian ini juga dilakukan pada tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kecamatan Sawan. Alasan peneliti memakai lokasi di Kecamatan Sawan karena melihat fakta dilapangan kinerja Bumdes seperti Bumdes Desa Bungkulan dan Desa Sudaji belum optimal. Selain dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada diambinya Kecamatan Sawan sebagai tempat penelitian dikarenakan dilihat dari hasil observasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), berikut data beberapa Bumdes tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 1.1
Data Bumdes Tahun 2021

No	Kecamatan	Status Bumdes			
		Terbentuk	Bertumbuh	Berkembang	Maju
1	Sawan	4	4	4	2
2	Kubutambahan	2	2	4	5
3	Buleleng	-	2	7	3
4	Tejakula	-	1	8	1

(Sumber: Data Dpmd Buleleng tahun 2021)

Dilihat dari data diatas, kondisi Bumdes di Kecamatan Sawan yakni terdapat 4 Bumdes yang masih baru terbentuk, 4 Bumdes yang dalam tahap bertumbuh, 4 Bumdes berada di tahap Berkembang, dan 2 Bumdes yang sudah maju. Tentunya ini jauh terbelakang jika dibandingkan dengan Kecamatan Kubutambahan yakni 2 Bumdes yang baru terbentuk, 4 Bumdes dalam tahap berkembang, 2 Bumdes dalam tahap bertumbuh, dan 5 Bumdes yang sudah maju, Kecamatan Buleleng yakni 7 Bumdes tahap berkembang, 2 Bumdes tahap bertumbuh dan 3 Bumdes

yang sudah maju , serta Kecamatan di Tejakula yakni 8 Bumdes yang tahap berkembang, 1 Bumdes dalam tahap Tumbuh, dan 1 Bumdes yang sudah Maju. Ketiganya merupakan Kecamatan dengan kondisi Bumdes yang terbaik di Kabupaten Buleleng. Dengan data dalam hasil observasi menunjukkan hal demikian, maka peneliti memilih Kecamatan Sawan sebagai lokasi penelitiannya. Hal ini menjadi sorotan dimata masyarakat terkait tidak maksimalnya kinerja di beberapa Bumdes di Kecamatan Sawan, serta penelitian sebelumnya menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas area survei atau diluar lokasi yang dijadikan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kecukupan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Bumdes di Kecamatan Sawan (Studi Empiris Pada Bumdes di Kecamatan Sawan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya penyusunan anggaran yang berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan partisipasi bawahan, sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya.

2. Sumber dana yang terbatas menghambat penyusunan anggaran, karena dengan dana yang terbatas pihak manajemen Bumdes sulit untuk menentukan berapa aktivitas yang akan dilakukan kedepannya.
3. Sasaran anggaran yang tidak jelas menyebabkan organisasi kesulitan dalam mencapai tujuan anggaran yang telah disepakati.
4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjukkan kinerja entitas perusahaan ataupun organisasi. Namun dalam implementasinya masih ada beberapa Bumdes yang tidak menggunakan sistem informasi akuntansi secara terkomputerisasi padahal ini berpotensi menimbulkan kecurangan dan juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja dari Bumdes tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada pengujian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, Kecukupan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bumdes. Objek penelitian pada Bumdes di Kecamatan Sawan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja dari Bumdes?
2. Bagaimana pengaruh kecukupan anggaran terhadap kinerja Bumdes?
3. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Bumdes?
4. Bagaimana efektifitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja Bumdes?
5. Bagaimana pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kecukupan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan efektifitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bumdes?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan terhadap kinerja Bumdes
2. Mengetahui pengaruh kecukupan anggaran terhadap kinerja Bumdes
3. Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Bumdes
4. Mengetahui efektifitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja Bumdes
5. Mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kecukupan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan efektifitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Bumdes.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis tentang adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang didapat selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata. Sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang penyelesaian permasalahan dan mengatasi kesulitan dalam pencapaian kinerja yang baik pada Bumdes.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi manajemen khusus pada Bumdes dan untuk menambah referensi-referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi Pemerintah Daerah adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang kinerja pada Bumdes.
- c. Bagi Bumdes hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan juga karyawan untuk meningkatkan kinerja Bumdes dengan memperhatikan faktor-faktor seperti partisipasi seluruh unit dalam penyusunan anggaran, kecukupan anggaran yang ada dan anggaran yang direncanakan secara jelas serta memanfaatkan sistem informasi secara efektif.